

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Beberapa unsur-unsur pajak :

1. Iuran dari rakyat kepada negara Yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2. Pengertian Pajak

Apabila dilihat pada sejarah, pemungutan pajak yang mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara terlaksana di dalam kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan Negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum; membiayai pegawai kerajaan dan-sebagainya. **(DR. Bohari, 2008:1).**

Adriani dalam **(Bohari, 2008 :23)** memberikan definisi sebagai berikut Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas.

Pajak menurut **Soeparman** dalam **(Waluyo,2007:3)** adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut **Ismawan (2001:4)** Pajak adalah iuran, kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis *dapat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat ditakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang, dan sandera.

Menurut **Guritno Mangkoesoebroto** memberikan definisi pajak sebagai berikut Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

Adapun pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut

1. Berfungsi sebagai *Budgeter*, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Berfungsi sebagai *Regulatory*, karena pajak berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi masyarakat..

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sementara itu dapat dilihat pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut?

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat

- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

2.3. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atau dikenakan bagi pengusaha/perorangan yang membudidayakan sarang burung walet dengan peraturan bupati untuk menambah pendapatan kas daerah dari dasar di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet,

Dalam melaksanakan pemungutan sarang burung walet ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan tahapan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Pendataan

Pendataan merupakan kegiatan turun kelapangan/masyarakat untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai, pendataan bertujuan untuk mengetahui hasil panen penangkaran sarang burung walet yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang mengusahakan dan mengambil Sarang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Burung Walet.

Sebagaimana tugas pokok dari bagian pendataan, penetapan dan keberatan kegiatan pendataan dilakukan dengan oleh tim pendata yang dibentuk oleh Bagian Pendataan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian tim pendata melakukan pendataan kepada wajib pajak atas hasil panen penangkar sarang burung Walet yang dimiliki. Adapun ukuran keberhasilan dari tim ini adalah data yang dikumpulkan benardan akurat hal ini akan membantu pemungutan pajak sarang burung Walet dapat optimal.

2. Penghitungan dan Penetapan

Tata cara perhitungan besar pajak yang harus dibayarkan dengan cara sebagai berikut :

Pasal 6

- 1) Dasar pengenaan Pajak sarang burung walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- 2) Nilai Jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume hasil Sarang Burung Walet.

Pasal 7

Besarnya tarif Pajak ditetapkan 7% (tujuh persen) dari hasil penjualan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 8

Besarnya pokok pajak sarang burung walet yang terhutang adalah dengan megalikan tarif pajak sebagaimana, dimaksud dalam pasal 7 dengan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 6. Ayat (1)

Data hasil penjualan tersebut dikumpulkan dan dihitung kemudian diterbitkan surat ketetapan Pajak sarang burung walet. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diserahkan kepada seksi penagihan dan pengendalian untuk mengumpulkan dari-pengusaha walet.

Penetapan pajak sarang burung walet diatur pada pasal :

pasal 11

- 1) Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD SKPDKB,SKPDKBT.

Pasal 12

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- 3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah jatuh tempo terhutang pajak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. SKPDKBT
- c. SKPDN

3. Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pembayaran pajak terhutang diatur pada pasal 14

- 1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPP, SKPDKBT dan STPD
- 2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang, ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- 4) Tata cara Pengisian SPTPD dan SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- 1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas
- 2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 16

- 1) Bupati Dapat Menerbitkan STPD:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- 1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau Surat peringatan atau lainnya yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- 3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa apabila jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SKPDKB, STPD, Surat Keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24(dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 20

- 1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri.
- 2) Setelah Juru Sita Pengadilan Negeri menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, dan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis, dan tata cara pengisian formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan sebagai rujukan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarisi 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul “Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Penagkaran Sarang Burung Walet”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bagaimana pemerintah daerah dalam hal yang meliputi pengawasan, tata tertip penagkar pajak sarang burung walet.

Penelitian oleh Edi Gunawan 2012 yang berjudul “Analisis Impelemntasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Bengkalis” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa belum maksimalnya implementasi peraturan daerah dalam hal pemungutan dan pendataan pajak sarang burung walet.

2.5. Pajak Dalam Konsep Islam

Pajak dalam pandangan Islam sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surat At- Taubah Ayat 29.



Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(At- taubah,:29)

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutannya dapat dipaksakan di mana dalam ayat di atas boleh diparangi bagi yang tidak mau membayar jizyah.

Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak di pungut menurut secara islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh diparangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang

Telah dikeluarkan

2.6. Definisi Konsep

a. Konsep operasional

Untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka akan di opsionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi :

1. Pemungutan adalah suatu hasil yang dicapai Pemerintah Daerah dalam hal ini Pajak Sarang Burung Walet dari pengusaha yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atau dikenakan bagi pengusaha/penangkar yang membudidayakan sarang burung walet oleh pemerintah kabupaten indragiri hilir.
3. Untuk menambah pendapatan/penerimaan kas daerah dari segi pajak sarang burung walet yang akan di gunakan untuk belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. indikator penelitian

Adapun indikator dalam penelitian ini tentang Analisis Pemungutan Pajak

Sarang Burung Walet. Terdapat 3 Indikator yaitu sebagai berikut :

1. Pendataan
2. Perhitungan dan Penetapan
3. Pembayaran dan Penagihan Pajak

2.7. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

